

PELUANG DAN TANTANGAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH DAN PENERAPAN MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH (Refleksi Hasil-hasil Penelitian Pembiayaan Pendidikan)

Wagiran *)

Abstrak

Globalisasi yang diikuti dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketatnya persaingan pasar kerja menuntut lembaga pendidikan termasuk pendidikan menengah kejuruan untuk benar-benar menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam operasionalnya diperlukan biaya yang makin besar. Krisis ekonomi yang berakibat menurunnya kemampuan pemerintah dalam pembiayaan pendidikan, diberlakukannya otonomi daerah serta penerapan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) merupakan tantangan sekaligus peluang bagi lembaga pendidikan kejuruan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan. Lembaga pendidikan kejuruan harus lebih mandiri, kreatif dan inovatif dalam menggali dan mengalokasikan berbagai sumberdaya dan sumber dana bagi pembiayaan pendidikan.

Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa seiring dengan diterapkannya otonomi daerah serta MPMBS, belum terjadi perubahan mendasar orientasi pembiayaan pendidikan termasuk pendidikan menengah kejuruan. Pembiayaan pendidikan pada SMK Negeri masih mengandalkan dana dari pemerintah, sedangkan pada SMK Swasta masih sangat bergantung pada orangtua siswa. SMK belum mampu menggali dana secara maksimal dari masyarakat, dunia usaha/industri serta memanfaatkan potensi yang dimiliki secara maksimal.

Mengingat turunnya kemampuan pemerintah serta kondisi ekonomi orangtua siswa yang pada umumnya rendah, SMK dituntut untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan. Peningkatan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha/industri, penerapan Production Based Education serta optimalisasi pengelolaan unit produksi merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk mendukung pembiayaan pendidikan.

Kata kunci: Pembiayaan Pendidikan, Pendidikan Menengah Kejuruan, Otonomi Daerah